



REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota



Nomor : 970/341/BAPENDA/2020
Tanggal : 01/04/2020

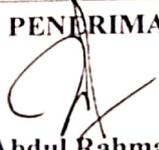
No. Koreksi : 228

Instansi : Badan Pendapatan Daerah Kota Palu
Tentang : Penerima Pembayaran Insentif Pungutan Pajak Daerah Triwulan I tahun 2020

PETUGAS


Hamka

PENRIMA


Abdul Rahman

Catatan :

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-HNAA 01/04/2010:59



**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR**

TENTANG

**PENERIMA PEMBAYARAN INSENTIF PUNGUTAN PAJAK DAERAH
TRIWULAN I TAHUN 2020**

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Wali Kota Palu Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pungutan Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Palu Nomor 26 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pungutan Pajak dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penerima Pembayaran Insentif Pungutan Pajak Daerah Triwulan I Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>Sh</i>
OPD PEMRAKARSA	<i>F</i>

Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

4. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);
5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10);
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
8. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2013 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Palu Nomor 26 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2015 Nomor 26);

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>[Signature]</i>
OPD	<i>[Signature]</i>
PEMRAKARSA	

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENERIMA PEMBAYARAN INSENTIF PUNGUTAN PAJAK DAERAH TRIWULAN I TAHUN 2020.
- KESATU : Penerima Pembayaran Insentif Pungutan Pajak Daerah Triwulan I Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Insentif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU secara proporsional dibayarkan kepada:
- Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
 - Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah; dan
 - Pejabat dan Pengawai Badan Pendapatan Daerah Kota Palu sebagai Perangkat Daerah pelaksana pemungut Pajak Daerah sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2020 pada Badan Pendapatan Daerah Kota Palu.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

WALI KOTA PALU,

HIDAYAT

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	Sh
OPD PEMRAKARSA	A

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR
TENTANG
PENERIMA PEMBAYARAN INSENTIF PUNGUTAN
PAJAK DAERAH TRIWULAN I TAHUN 2020

No	Nama	Jabatan Dalam Instansi
1	2	3
1	Drs. Hidayat, M.Si	Wali Kota Palu
2	Sigit Purnomo Said	Wakil Wali Kota Palu
3	Asri, SH	Sekretaris Daerah Kota Palu
4	DR. Farid Rifai, M.Si	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Palu
5	Drs. Tamin Tombolotutu	Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kota Palu
6	Susy Syamsul Bachry, SH., M.Si	Kepala Bidang Pendapatan I
7	Mursidin Hi. Yusuf, S.Sos., M.Si	Kepala Bidang Pendapatan II
8	Hj. Rosna, SH., M.AP	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah
9	Mohamad Akbar, SE	Kasubag Umum Dan Kepegawaian
10	Nuriva	Staf Golongan III
11	Andi Namirah	Staf Golongan II
12	Masrin	Staf Golongan II
13	Djariati Suhong, SE	Kasubag Perencanaan Program dan Keuangan
14	Rini Pratiwi, SE	Staf Golongan III
15	Hamsia Yusup, S.Si	Staf Golongan III
16	Lisdawati, S.Sos	Staf Golongan III
17	Abd. Rahman, A.Md	Staf Golongan III
18	Andi Nur Afni, A.Md	Staf Golongan II
19	Andi Irawan	Staf Golongan II
20	Novayanti, SE	Kasub. Bid. Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah
21	Deivy Cristalina, SE	Staf Golongan III
22	Zahra Abd.Muis, SE	Staf Golongan III
23	Ritha, S.Sos	Staf Golongan III
24	Sulaeman, S.Sos	Staf Golongan III
25	Achdiat Magu Datu, A.Md	Staf Golongan II
26	Makruf	Staf Golongan II
27	Syahril, S.Sos	Kasub. Bid. Penetapan dan Verifikasi Pajak Daerah
28	Syamsiar, S.Si	Staf Golongan III
29	Mohammad Ali, SE	Staf Golongan III
30	Ade Mariani, A.Md	Staf Golongan III
31	Lili Herawati, A.Md	Staf Golongan III
32	Herson Bayu Samudra, A.Md	Staf Golongan III
33	Justi Rantetasik, SE	Staf Golongan III
34	Sarfin Marbi	Staf Golongan II
35	Daeng Talara	Staf Golongan II
36	Sopian Supu	Staf Golongan II
37	Endang, SE	Kasub. Bid. Penagihan dan Pembukuan Pajak Daerah
38	Samiri Masinona, S.Sos	Staf Golongan III
39	Mohamad Ichsan, SE	Staf Golongan III
40	Burhan	Staf Golongan III
41	Moh. Nawir	Staf Golongan III
42	Nurmas Rahim	Staf Golongan III
43	Anton	Staf Golongan II
44	Saleh Yusuf	Staf Golongan II
45	Siti Aminah	Staf Golongan II
46	Windu Rahayu	Staf Golongan II
47	Muliana	Staf Golongan II

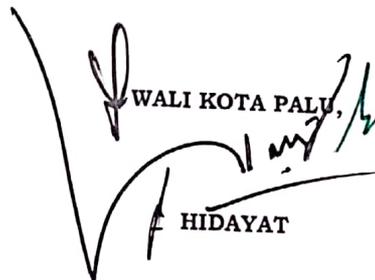
PARAF KOORDINASI

BAGIAN HUKUM

OPD

PEMBAYARAN

48	Murjiyato Kayo, BSc	Kasub. Bid. Penagihan dan Pembukuan PBB & BPHTB
49	Rhany Meydi Putri, SE	Staf Golongan III
50	Rada Megawati, SE	Staf Golongan III
51	Deiby Frida, SE	Staf Golongan III
52	Sri Wahyuni, SE	Staf Golongan III
53	Berta, S.Si	Staf Golongan III
54	Aminah Hanapi Buloe	Staf Golongan III
55	Anna	Staf Golongan II
56	Moh. Sofyan, SE	Kasub. Bid. Pengolah Data dan Informasi PBB & BPHTB
57	Mohamad Fahri	Staf Golongan II
58	Moh. Wira Arezki Lamakarate, SH	Kasub. Bid. Pendataan, Penilaian PBB dan BPHTB
59	Kelly John Kennedy, ST	Staf Golongan III
60	Fathurrahman, SE	Staf Golongan III
61	A.M Tanrawali	Staf Golongan II
62	Dedy Sakti	Staf Golongan II
63	Musrifa I Palarante	Staf Golongan II
64	Agung Wahyudi, SE	Kasub Bid. Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Lainnya
65	Munifa, S.Sos	Staf Golongan III
66	Hersanto	Staf Golongan II
67	Indra Jaya	Staf Golongan II
68	Firdaus, S.Sos	Kasub Bid. Pengawasan, Evaluasi Pajak, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah
69	Mohammad Adnan, S.Sos	Staf Golongan III
70	Nurdin	Staf Golongan III
71	Ispandia, S.Sos	Kasub Bid. Keberatan, Pengawasan dan Pemeriksaan Wajib Pajak
72	Naim, S.A.P	Staf Golongan III
73	Fanky Rahmad	Staf Golongan II
74	Sukma Safrianto, SH	Kepala UPT Pendapatan Wilayah I
75	Mustaan	Staf Golongan II
76	Deisi Silviana Russen, SH	Kepala UPT Pendapatan Wilayah II
77	Adriana	Staf Golongan II
78	Esna	Staf Golongan II
79	Abd. Hafid, S.Sos	Kepala UPT Pendapatan Wilayah III
80	Faharudin	Staf Golongan II
81	Dandi Dwi Nugroho	Staf Golongan II
82	Said Adam, SH	Kepala UPT Pendapatan Wilayah IV
83	Kisman. AL	Staf Golongan III
84	Nilam Zurma, S.Sos	Staf Golongan III
85	Amir	Staf Golongan II


 WALI KOTA PALU,
 HIDAYAT

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>ph</i>
OPD PEMRAKARSA	<i>A</i>